

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Bertitik tolak dari Undang - undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menyatakan bahwa prinsip Otonomi yang berlaku adalah prinsip Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti bahwa pemberian Otonomi kepada daerah haruslah berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti tindakan – tindakan disertai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Arti bertanggung jawab disini adalah bahwa pemberian Otonomi itu sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk melancarkan pembangunan di seluruh pelosok tanah air dengan serasi atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Demi terlaksananya tujuan diatas dengan baik sebagaimana yang kita harapkan, maka daerah harus mempunyai keuangan yang cukup. Semakin besar keuangan suatu daerah maka semakin besar pulalah kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam meningkatkan kesejahteraan

penduduknya, dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah tersebut untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya.

Pemerintah Pusat selalu memberikan berbagai bantuan terhadap daerah otonom sebagai pendorong terselenggaranya roda pemerintahan di daerah, namun yang paling penting adalah agar daerah otonom sanggup dan mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sendiri demi terselenggaranya roda pemerintahan di daerah tanpa banyak mengharapkan bantuan dari pusat. Sebab sebagaimana yang tersirat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah bahwa apabila suatu daerah tidak mampu membiayai pengeluaran rutinnya saja, maka daerah tersebut akan menerima konsekuensi yang sangat berat yaitu pencabutan hak otonominya oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menghadapi tantangan yang berat ini daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan mengintensifkan segala sumber-sumber penerimaan daerah tersebut dengan cara meningkatkan penerimaan dari pungutan pajak masyarakat, menertibkan administrasi dinas pendapatan, menanamkan rasa dedikasi yang tinggi terhadap setiap aparat pelaksana pungutan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diharapkan peningkatannya.

Banyak tantangan ataupun rintangan yang sering dihadapi dan sering terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, seperti penggelapan pajak, tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan penyeteran tepat pada waktunya, pengelolaan administrasi yang kurang sempurna, aparat pelaksana yang kurang kesungguhan